

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto bagian keenam pasal 9 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai pejabat pengawas pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang :

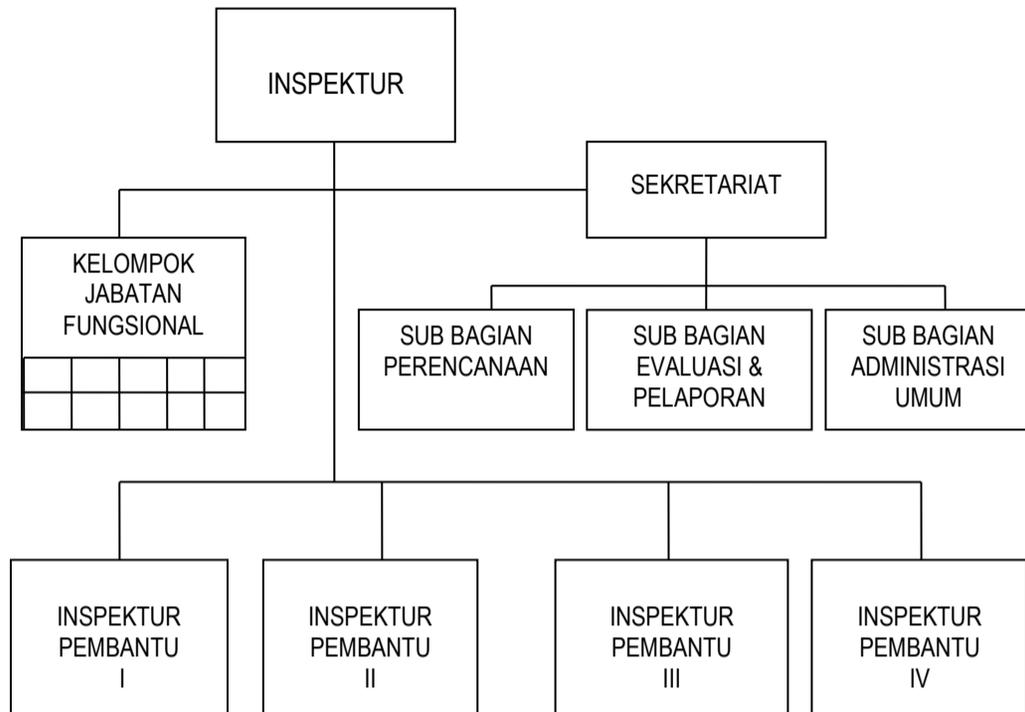
- a. Administrasi Umum Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ;
- b. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Struktur organisasi Inspektorat Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum

- c. Inspektur Pembantu I, :
- d. Inspektur Pembantu II,
- e. Inspektur Pembantu III,
- f. Inspektur Pembantu IV,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR - 2.1
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO
(BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2011)



2.2. SUMBER DAYA

A. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Inspektorat sampai dengan kondisi Nopember 2015 adalah sebanyak 26 orang. Gambaran komposisi pegawai menurut jabatan dalam organisasi ditunjukkan pada tabel berikut ini :

TABEL 2.2.1
KOMPOSISI PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO
(Per Nopember 2015)

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Wanita	Jumlah
i. Inspektorat Kota Mojokerto			
1.1 Inspektur	1	-	1
ii. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	-	1	1
2.2 Sub. Bag. Perencanaan	1	-	1
2.2.1 Staf Pendukung	-	1	1
2.3 Sub. Bag. Evaluasi & Pelaporan	-	1	1
2.3.1 Staf Pendukung	1	-	1
2.4 Sub. Bag. Administrasi Umum	-	1	1
2.4.1 Staf Pendukung	2	1	3
iii. Inspektur Pembantu I	-	1	1
iv. Inspektur Pembantu II	-	1	1
v. Inspektur Pembantu III	1	-	1
vi. Inspektur Pembantu IV	-	1	1
3.4.1 Staf Pendukung	1	-	1
vii. Fungsional Auditor	5	6	11
JUMLAH	12	14	26

B. Pegawai Menurut Golongan

Dari komposisi pegawai Inspektorat Kota yang keseluruhan berjumlah 30 orang, keseluruhannya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Inspektorat Kota menurut golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

TABEL 2.2.2
KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN RUANG
(Per Nopember 2015)

No.	Gol. Ruang	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	2	2	4
3.	Golongan IV/a	1	3	4
4.	Golongan III/d	3	5	8
5.	Golongan III/c	1	2	3
6.	Golongan III/b	3	4	7
7.	Golongan III/a	4	2	6
	Jumlah	15	18	33

C. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Inspektorat Kota menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

TABEL 2.2.3
KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
(Per Nopember 2015)

No.	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	3	4	7
2.	Sarjana S-1	8	11	19
3.	Diploma III	1	1	2
4.	SLTA	1	1	2
	Jumlah	13	17	30

2.3. KINERJA PELAYANAN

Terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan misi Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh perencanaan di masing-masing Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam kenyataan apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Adapun kinerja pelayanan Inspektorat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel terlampir.

TABEL 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kualitas sarana dan prasarana	-	-	-	50 %	50 %	50 %	60 %	100 %	50 %	50 %	50 %	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Besaran alokasi anggaran	-	-	-	1.191.911.800	1.549.766.850	1.320.340.725	1.343.998.250	2.067.577.450	1.320.445.000	1.591.195.005	1.264.831.004	1.538.316.941	1.896.597.484	111 %	103 %	96 %	114 %	92 %
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	42 %	100 %	100 %	100 %	75 %	42 %	100 %
4	Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala	-	-	-	47 UKPD	54 UKPD	63 UKPD	68 UKPD	68 UKPD	47 UKPD	54 UKPD	63 UKPD	68 UKPD	80 UKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentil	-	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase pelanggaran disiplin tertangani	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Jumlah SOP dan SPM SKPD	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 (PERUBAHAN)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
9	Besaran TP-TGR	-	-	-	3 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	4 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
10	Prosentase SPIP SKPD terselesaikan	-	-	-	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan	-	-	-	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	2 org	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
13	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan	-	-	-	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan	-	-	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan	-	-	-	5 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	5 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	5 jenis	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Kualitas peralatan kerja penunjang pemeriksaan	-	-	-	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Bertitik tolak dari tabel di atas, teridentifikasi bahwa capaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto, hampir seluruhnya mencapai 100 %. Namun demikian, capaian ini didasarkan pada target sasaran perencanaan yang memang masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal dari organisasi. Sebagai contoh, prasarana dan sarana kantor, meskipun rasio capaiannya 100 %, tetapi kondisi riil yang ada belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara optimal.

Demikian pula aspek sumber daya aparaturnya, dari jumlah 30 orang Inspektur Pembantu dan pemeriksa, baru 6 orang yang sudah mengikuti Diklat Pengawasan. Sebenarnya, terdapat 10 orang yang sudah lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), namun demikian pada tahun 2013 yang lalu, sebagian besar personil Inspektorat tersebut, yaitu sebanyak 4 orang telah dimutasi ke SKPD yang lain. Itupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum sepenuhnya didukung oleh peralatan kerja yang memadai, seperti jumlah dan jenis peralatan pemeriksaan konstruksi bangunan, laptop, kendaraan dinas, dan sebagainya. Kondisi ini sangat terkait dengan alokasi anggaran untuk bidang pengawasan yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan organisasi.

Pada aspek manajemen pengawasan, juga belum mempunyai SOP dan SPM pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tahapan implementasinya baru sampai pada tahap sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan satgas SPIP dan pemetaan Lingkungan Pengendalian di 4 SKPD sebagai sampling, belum sampai pada langkah penyusunan diagnostic assesment dan langkah-langkah pengendalian resiko lingkungan organisasi. Demikian pula, pelaksanaan koordinasi yang lebih komprehensif dengan aparat pengawasan fungsional dan SKPD yang merupakan stakeholders Inspektorat perlu lebih dioptimalkan. Output dari berbagai kondisi ini, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih sering terlambat, pra pemuatkhiran data dan pemuatkhiran data juga mengalami keterlambatan. Demikian pula, reviu laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya, juga mengalami keterlambatan.

TABEL 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 (PERUBAHAN)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	2,759,716,300	3,148,362,400	2,840,125,650	3,490,036,250	3,938,377,450	2,719,881,509	2,977,827,690	2,217,745,815	3,219,794,382	3,693,868,288	99	95	78	92	94	-	-
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	1,410,913,400	1,451,647,700	1,559,533,350	1,727,248,050	1,870,800,000	1,399,436,509	1,386,632,685	1,328,016,231	1,681,477,441	1,797,270,804	99	96	85	97	96	-	-
- Belanja Pegawai	1,410,913,400	1,451,647,700	1,559,533,350	1,727,248,050	1,870,800,000	1,399,436,509	1,386,632,685	1,328,016,231	1,681,477,441	1,797,270,804	99	96	85	97	96	-	-
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Belanja Langsung</i>	1,348,802,900	1,696,714,700	1,280,592,300	1,762,788,200	2,067,577,450	1,320,445,000	1,591,195,005	1,264,831,004	1,538,316,941	1,896,597,484	98	94	69	87	92	-	-
- Belanja Pegawai	246,590,000	511,664,000	404,970,000	622,035,000	411,575,000	246,590,000	478,729,000	402,245,000	554,180,000	383,280,000	100	94	71	89	93	-	-
- Belanja Barang dan Jasa	938,821,750	1,128,586,550	833,375,050	1,070,656,700	1,525,989,750	918,304,400	1,056,496,505	820,791,654	917,742,941	1,391,691,234	98	94	69	86	91	-	-
- Belanja Modal	163,391,150	56,464,150	42,247,250	70,096,500	130,012,700	155,550,600	55,969,500	41,794,350	66,394,000	121,626,250	95	99	61	95	94	-	-
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	Uraian
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(2,759,716,300)	(3,148,362,400)	(2,840,125,650)	(3,490,036,250)	(3,938,377,450)	(2,719,881,509)	(2,977,827,690)	(2,217,745,815)	(3,219,794,382)	(3,693,868,288)	99	95	78	92	94	-	-

Mencermati tabel diatas, dengan belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja, sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya, kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula, anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalam pertanggungjawabannya. Pagu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besaran anggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggaran karena ketidaksesuaian tersebut.

Berikut disajikan tabel yang menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Inspektorat tahun 2014-2019.

TABEL 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014-2019

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Perencanaan Pembangunan										
	Program Pengembangan Data/Informasi										
1	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	4,500,000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,386,100
	Bidang Pemerintahan Umum										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	22,000,000	21,995,000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,500,000	17,280,300	53,500,000	43,967,355	35,000,000	29,858,754	35,000,000	32,715,541	35,000,000	42,727,734
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	21,698,600	21,698,600	25,460,000	25,428,000	25,540,000	23,740,000	30,500,000	29,888,500	50,540,000	42,232,000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15,600,000	15,600,000	22,600,000	22,600,000	24,000,000	24,000,000	37,200,000	32,600,000	42,900,000	41,300,000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,000,000	12,000,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	11,800,000	11,800,000	13,755,000	10,595,000	15,459,000	14,825,000
9	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	22,665,300	22,665,300	22,965,300	22,965,300	25,956,300	25,956,300	26,592,500	26,592,500	30,781,850	29,440,800
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	15,000,000	21,500,000	21,500,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,250,000	17,717,350
11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000	1,457,250	6,500,000	6,500,000	7,475,000	7,475,000	7,479,600	7,479,600	7,479,600	7,073,000
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,320,000	6,320,000	6,320,000	6,320,000	7,900,000	7,614,200	5,640,000	5,594,000	5,640,000	5,406,500
13	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,125,000	3,125,000	4,222,800	4,222,800	4,225,000	4,225,000
14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	32,000,000	28,157,050	30,000,000	26,619,050
15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	65,000,000	64,415,200	75,000,000	74,895,000	122,000,000	121,803,500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
16	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14,300,000	14,300,000	24,920,000	24,838,000	31,787,100	31,690,650	5,000,000	4,990,000	42,068,250	39,959,750
18	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	158,576,150	150,735,600	27,864,150	27,451,500	6,660,650	6,590,000	62,096,500	58,450,000	84,944,450	78,900,000
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	22,500,000	22,500,000	29,400,000	29,100,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	18,737,000
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	5,000,000	4,950,000

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 (PERUBAHAN)

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
21	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
22	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
23	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	92,640,000	90,290,000	129,636,400	112,451,400	148,834,100	148,759,100	251,350,600	244,294,100	392,866,000	388,232,600
24	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	22,800,000	22,800,000	42,975,200	30,620,000	21,050,000	19,677,050	25,000,000	15,900,000	31,980,000	30,377,400
25	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	142,861,400	142,861,400	197,627,650	193,027,650	245,115,550	243,015,550	280,000,000	231,010,000	330,011,300	282,822,750
26	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	40,064,150	40,064,150	40,064,150	40,064,150	40,199,900	40,199,900	88,999,800	80,419,800	152,220,000	140,802,850
27	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	50,000,000	49,954,200	50,000,000	48,320,000	50,500,000	49,830,000	45,000,000	43,875,000	51,637,000	48,753,100
28	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,080,000	75,200,000	74,580,000	61,330,700	56,730,700	75,825,000	72,504,750
29	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat Pengawasan										
30	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	466,672,300	464,813,200	671,861,850	657,011,650	250,500,000	249,300,000	568,430,700	446,897,350	444,250,000	362,711,250
31	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	23,305,000	23,305,000	56,220,000	12,350,000	91,898,700	90,454,300	11,940,000	6,760,000	10,000,000	9,595,000
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan										
32	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	1,348,802,900	1,320,445,000	1,696,714,700	1,591,195,005	1,280,592,300	1,264,831,004	1,762,788,200	1,538,316,941	2,067,577,450	1,896,597,484

Dari tabel di depan, terdapat beberapa catatan yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran bidang pengawasan masih terdapat kelemahan, antara lain misalnya kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang realisasinya melampaui anggaran yang disediakan. Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK), hingga tahun yang lalu belum mendapatkan porsi anggaran sama sekali. Demikian pula, kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, hanya pada tahun anggaran 2010 mendapatkan alokasi anggaran, setelah itu tidak mendapatkan alokasi sama sekali. Padahal, selama kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang tentunya membutuhkan penyesuaian sistem dan prosedur pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan kondisi saat ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi Inspektorat Kota Mojokerto ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL - 3
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT TERHADAP
SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI
DAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2013	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
1	a. Kualitas sarana dan prasarana b. Kualitas peralatan kerja penunjang pemeriksaan	100 % 70 %	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan
2	a. Besaran alokasi anggaran b. Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran c. Besaran TP-TGR	1.896.597.484 2 3 milyar	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Mojokerto	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
4	<p>a. Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala</p> <p>b. Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentiil</p> <p>c. Prosentase pelanggaran disiplin tertangani</p> <p>d. Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan</p>	<p>50 UKPD</p> <p>12 kali</p> <p>100 %</p> <p>50 %</p>	<p>Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP</p>	<p>Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN</p>
5	<p>a. Jumlah SOP dan SPM SKPD</p> <p>b. Jumlah SPIP SKPD terselesaikan</p>	<p>2</p> <p>4 SKPD</p>	<p>Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah</p>	<p>1. Meningkatnya kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan.</p> <p>2. Meningkatnya upaya pengendalian dan manajemen resiko</p>
6	<p>a. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan</p> <p>b. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan</p> <p>c. Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan</p> <p>d. Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan</p>	<p>2 org</p> <p>30 org</p> <p>2 jenis</p> <p>2 jenis</p>	<p>Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas</p>	<p>1. Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan</p> <p>2. Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin</p>

Mencermati tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum apa yang telah dilakukan Inspektorat Kota Mojokerto melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, bersesuaian dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, jika dibandingkan capaian kinerja Inspektorat Kota Mojokerto yang diraih saat ini, kiranya masih belum mengindikasikan tercapainya sasaran Renstra yang ideal, khususnya dalam rangka mewujudkan beberapa sasaran strategisnya.

Beberapa sasaran strategis yang masih harus dicapai dan diupayakan secara berkesinambungan tersebut adalah, terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan, yang profesional, berintegritas dan disiplin, terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien, terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP, meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah serta meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP.

TABEL - 4
HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	-	Pusat Kegiatan Nasional Stasiun Kereta api	-	-	-
2	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Pusat Kegiatan Wilayah Jaringan Jalan Primer	Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Tol Sumo)	Penyediaan moda transportasi yang memadai	Inspektorat Kota Mojokerto
3	-	Pusat Kegiatan Lokal Terminal	-	-	-
4	-	Pusat Kegiatan Lokal jaringan prasarana sumber daya air	Peningkatan pelayanan Perusahaan daerah Air Minum	-	-
5	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pengembangan Kota Mojokerto sebagai Smart City	Penyediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan.	Inspektorat Kota Mojokerto

Dari hasil telaahan struktur ruang wilayah, dapat dikatakan dengan luas wilayah yang hanya 16,47 km persegi, penataan struktur ruang wilayah seperti Kota Mojokerto sebagai pusat kegiatan nasional jaringan jalan primer dan jaringan prasarana telekomunikasi, tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat Kota Mojokerto. Secara khusus, terkait dengan keperluan penyediaan sarana transportasi yang memadai dan penyediaan peralatan teknologi informasi guna menunjang tugas pelayanannya. Ketersediaan perangkat teknologi informasi

ini merupakan prasyarat bagi terbangunnya sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.

TABEL - 5
HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Lindung : a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kawasan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Lindung : a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kawasan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Lindung : a. Pembangunan Tanggul sungai sekurang2nya 3 m b. Pengembangan RTH publik dan privat c. Perlindungan Kawasan Cagar Budaya d. Penataan Kawasan Rawan Banjir	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Lindung	Inspektorat Kota Mojokerto
2	Kawasan Budaya : a. Perumahan b. Perdagangan dan Jasa c. Perkantoran d. Industri e. Pariwisata f. Ruang Terbuka Non Hijau g. Evakuasi Bencana h. Kegiatan Sektor Informal i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)	Kawasan Budaya : a. Perumahan b. Perdagangan dan Jasa c. Perkantoran d. Industri e. Pariwisata f. Ruang Terbuka Non Hijau g. Evakuasi Bencana h. Kegiatan Sektor Informal i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)	Kawasan Budaya : a. Rencana Pembangunan Rumah Susun di kawasan padat penduduk b. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern c. Peningkatan Fisik Pembangunan Perkantoran Pemerintahan d. Pengembangan Kawasan Industri mikro kecil dan menengah e. Pengembangan Kawasan Pariwisata buatan f. Pengembangan Lapangan Olah Raga Tertutup g. Penyediaan Kawasan Evakuasi Bencana banjir h. Pengembangan Kawasan PK5 i. Pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan dan perikanan	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Budaya	Inspektorat Kota Mojokerto

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6
3	Kawasan Strategis : a. Perdagangan dan Jasa b. Industri	Kawasan Strategis : a. Perdagangan dan Jasa b. Industri	Kawasan Strategis : a. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern b. Pengembangan Kawasan Industri sedang	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis	Inspektorat Kota Mojokerto

Demikian pula dari hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kota Mojokerto yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032, tentunya akan berpengaruh banyak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat. Secara spesifik, pengembangan dan pertumbuhan pembangunan kawasan Kota Mojokerto berkorelasi signifikan terhadap pemanfaatan ruang yang tersedia. Kondisi ini tentunya menuntut konsekuensi bagi peningkatan tugas pengawasan dan kebutuhan akan pengembangan dan peningkatan standar, norma dan prosedur pengawasan pada berbagai bidang, khususnya dalam rangka pemanfaatan ruang Kota yang semakin tumpang tindih dan kompleksitasnya meningkat akibat keterbatasan lahan.

TABEL - 6

HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA MOJOKERTO

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Inspektorat	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Inspektorat
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kurang Mendukung	Perlu peningkatan pengawasan tata guna lahan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang tata guna lahan
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Semakin meningkatnya resiko kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan dan laju pertumbuhan pembangunan	Peningkatan pengawasan dampak dan resiko lingkungan hidup	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang dampak dan resiko lingkungan hidup

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Inspektorat	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Inspektorat
1	2	3	4	5
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Dekomposisi sampah dan pengolahan air minum yang sehat semakin diperlukan	Peningkatan pengawasan pengelolaan sampah dan air minum	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang persampahan dan pengelolaan air minum
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ketersediaan sumber daya alam (air bersih dan sumber daya terbarukan) semakin menipis	Peningkatan pengawasan pemanfaatan air bersih dan sumber daya terbarukan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang pemanfaatan sumber daya alam
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Fenomena global warming dan anomali cuaca	Peningkatan pengawasan kualitas baku mutu udara	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan kualitas baku mutu udara
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pencemaran mengancam ekosistem air sungai	Peningkatan pengawasan kualitas air sungai	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan ekosistem sungai

Dari hasil telaahan hasil analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Mojokerto, khususnya pada aspek kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, tentunya ke depan akan sangat berdampak pada efisiensi pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan. Sementara, di pihak lain, pertumbuhan angka demografis dan pertumbuhan sosial ekonomi, tentu mendorong munculnya permasalahan baru bagi pembangunan kota. Kompleksitas permasalahan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dan hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk terus mengembangkan standar, norma dan prosedur pengawasan di bidang lingkungan hidup.

Dari data yang tersaji di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi obyektif Inspektorat Kota Mojokerto yang dihadapkan pada peluang dan tantangan sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan/Organisasi.

Struktur organisasi Inspektorat belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Inspektorat sampai saat ini belum terealisasi, agar ke depan mampu mewujudkan Inspektorat menjadi sebuah organisasi yang profesional.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Agar produk layanan Inspektorat yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih berkualitas dan memenuhi standar/norma yang ditetapkan, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin. Oleh karena itu, kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan adalah seluruh pejabat di Inspektorat Kota Mojokerto mempunyai kompetensi di bidang pengawasan. Sementara itu, kondisi obyektif yang ada sekarang Perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang disesuaikan dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target--target kinerja organisasi. Inspektorat juga belum memiliki sistem penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai, sebagaimana diamanatkan oleh PP No 46 Tahun 2011.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, maka ke depan Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya sarana dan prasarana yang representatif serta didukung adanya teknologi informasi yang memadai.

4. Bidang Pelayanan atau Produk Inspektorat

Berdasarkan bidang layanan atau produk Inspektorat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan agar lebih memberikan hasil/dampak yang lebih baik bagi sasaran pemeriksaan. Pada aspek ketatalaksanaan ini, Inspektorat juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengawasan. Kemampuan menghasilkan pelayanan yang baik kepada stakeholders sangat tergantung pada kemampuan pihak unit pendukung internal untuk memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto. Peluang ini dapat dioptimalkan, mengingat kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap

kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui *quality assurance*, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi. Oleh karena itu, belum adanya standar pengendalian internal tentunya menjadi salah satu penyebabnya belum terwujudnya tujuan SPI.

5. Bidang Manajemen Proses Pengawasan

Belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja. Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun sudah memperoleh penilaian WTP dari BPK, namun upaya untuk mempertahankan penilaian tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik.